



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHLAN
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 475605

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.293.220.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1131 m2/662 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 565.000.000
2. Tanah Seluas 4245 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. Tanah Seluas 5360 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 536.000.000
4. Tanah Seluas 8846 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 442.100.000
5. Tanah Seluas 2112 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 210.120.000
6. Tanah Seluas 1222 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 75.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU GRANDMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 23.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 39.438.232

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.431.158.232

III. HUTANG

Rp. 395.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.036.158.232



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.